

## Diskursus Penetapan Hari Santri Nasional (HSN) : Studi Terhadap Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

**Sekha Nuruly, Imam Muhsin**

*Program Magister Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

[Syekh.ly.akhmad@gmail.com](mailto:Syekh.ly.akhmad@gmail.com)

[imam.muhsin@uin-suka.ac.id](mailto:imam.muhsin@uin-suka.ac.id)

### Abstrak

Hari Santri Nasional diresmikan oleh pemerintah sebagai penghormatan untuk ulama dan santri tentang pengorbanan dan sumbangsih mereka pada masa lalu. Mengenai penetapannya mendapatkan berbagai macam tanggapan dari organisasi masyarakat, ada yang antusias dan ada yang kurang responsif. Penelitian ini menggunakan metode studi komparasi dengan pendekatan sosial politik untuk mengulas literatur yang terkait dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua organisasi masyarakat besar yang memiliki pandangan berbeda tentang Hari Santri Nasional. Hasil penelitian menunjukkan Nahdlatul Ulama cenderung menyambut baik Hari Santri Nasional dengan menganggap bahwa penyelenggaraan tersebut adalah bentuk penghargaan dan penghormatan atas kontribusi para santri yang ikut serta memajukan bangsa Indonesia. Adapun, Muhammadiyah cenderung menentang Penyelenggaraan Hari Santri Nasional dengan mengkhawatirkan bahwa penyelenggaraan itu dapat menimbulkan konflik antara kelompok santri dan non-santri. Penyebab dari perbedaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah pandangan dasar dari kedua organisasi kemasyarakatan tersebut dan penentuan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional dianggap hanya mewakili Nahdlatul Ulama saja.

### Kata kunci :

Respons, Hari Santri Nasional, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.

### Abstract

*The government inaugurated National Santri Day as a tribute to ulama and Santri (Islamic students) for their sacrifices and contributions in the past. Regarding its establishment, it received various kinds of responses from community organizations, some enthusiastic and some less responsive. This research uses a comparative study method with a socio-political approach to review literature related to Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, two large community organizations that have different views on National Santri Day. The results show that Nahdlatul Ulama tends to welcome the National Santri Day by considering that the implementation is a form of appreciation and respect for the contribution of Santri who have participated in advancing the Indonesian nation. Meanwhile, Muhammadiyah tends to oppose the National Santri Day by worrying that it could lead to conflict between Santri and non-Santri groups. The cause of the differences between Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah is the fundamental views of the two social organizations and the determination of 22 October as National Santri Day is considered to represent only Nahdlatul Ulama.*

### Keyword:

*Response, National Santri Day, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.*

## PENDAHULUAN

Usaha ulama dan santri dengan caranya sendiri bergabung bersama lapisan masyarakat untuk menyusun kekuatan di daerah-daerah pedalaman serta mengatur strategi untuk melawan penjajah serta mengajarkan kesadaran mengenai arti penting kemerdekaan. (Sitompul & Th, 2011)

Maka diperlukan keputusan mengenai Hari Santri Nasional sebagai pengingat untuk meneladani semangat jihad keindonesiaan yang dilakukan oleh para pejuang pendahulu, seperti semangat nasionalisme, semangat *hubbul Wathon*, semangat rela berjihad untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Keputusan Presiden mengenai penetapan Hari Santri Nasional yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal menggambarkan adanya bentuk perhatian oleh pemerintah kepada para pengajar dan pelajar yang mendalami keilmuan Islam di pesantren yang umumnya mereka disebut dengan istilah santri. (Meliala, 2015)

Pada tanggal 22 Oktober 2015, terjadi peristiwa yang bersejarah bagi seluruh kalangan santri di Indonesia ketika Presiden RI Joko Widodo secara resmi mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) No.22 Tahun 2015 dalam pengesahan surat keputusan mengenai Hari Santri Nasional. Penetapan tersebut tentu berdasarkan beberapa pertimbangan khusus yang sudah sepakati bersama, hingga menjadikan tanggal 22 Oktober dijadikan sebagai tanggal peringatan Hari Santri Nasional. Presiden Jokowi dalam penjelasannya merujuk pada sejarah yang tercatat, menggarisbawahi perjuangan serta

kontribusi signifikan yang telah diberikan oleh para santri, dari era sebelum kemerdekaan hingga fase perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Proses penetapan Hari Santri Nasional ini, secara alami mendapatkan respons yang signifikan dari beragam lapisan masyarakat. (BPK, 2015)

Golongan yang menyetujui pengukuhan Hari Santri Nasional sebagian besar berasal dari kalangan Ulama dan santri salaf tulen yang umumnya berasal dari pesantren-pesantren tradisional. Mereka berargumentasi bahwa pengesahan Hari Santri Nasional merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah terhadap kelompok santri yang memiliki peran sentral dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Sementara golongan yang menolak pengukuhan Hari Santri Nasional terdiri dari masyarakat umum, kelompok organisasi, dan santri yang cenderung memiliki pandangan yang lebih modern. Mereka berpendapat bahwa penetapan Hari Santri Nasional tidak memiliki relevansi yang signifikan karena Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Mereka khawatir keputusan publik semacam ini dapat menjadi batasan antara kelompok santri dan non-santri, mengingat Indonesia bukan hanya dihuni oleh kelompok santri. Alasan lainnya adalah tanggal 22 Oktober yang ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional hanya merujuk pada peristiwa historis dari satu organisasi masyarakat, yaitu Nahdlatul Ulama, sehingga dianggap tidak mencerminkan representasi yang luas dari masyarakat

Indonesia. Keseluruhan perbedaan pandangan terkait pengesahan Hari Santri Nasional ini terfokus pada dua organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Seyogyanya tidak mengherankan apabila dilihat dari sisi historis mengapa kedua ormas ini berbeda pendapat mengenai penetapan Hari Santri Nasional. Nahdlatul Ulama mewakili kelompok atau organisasi yang mendukung penetapan Hari Santri Nasional, sementara Muhammadiyah mewakili kelompok atau organisasi yang menolak penetapan tersebut. Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional dianggap oleh Muhammadiyah lebih mengarah pada dukungan terhadap Nahdlatul Ulama. Hal tersebut merupakan titik sentral fokus kajian peneliti dalam melihat faktor yang mempengaruhi perbedaan antara pendukung dan penentang penetapan Hari Santri Nasional, yang akan diuraikan secara lebih komprehensif dalam bagian pembahasan.

Penelitian tentang Hari Santri Nasional sangat penting dilakukan dengan meninjau respons dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang memiliki pandangan berbeda mengenai penetapan hari ini. Nahdlatul Ulama bersikap proaktif dan mendukung penuh penetapan Hari Santri Nasional, melihatnya sebagai bentuk pengakuan atas peran historis santri dan pesantren dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Dukungan ini ditunjukkan melalui berbagai kegiatan

dan program yang diinisiasi NU untuk memperingati Hari Santri Nasional. Di sisi lain, Muhammadiyah cenderung bersikap pasif dan tidak seantusias NU dalam merayakan Hari Santri Nasional. Pandangan Muhammadiyah lebih kritis, melihat penetapan hari tersebut sebagai suatu hal yang tidak harus dirayakan secara formal dan lebih fokus pada kontribusi nyata dalam pendidikan dan modernisasi Islam. Perbedaan respons ini menunjukkan pentingnya penelitian yang mendalam untuk memahami dinamika dan kompleksitas pandangan dari kedua organisasi besar ini. Dengan menggali lebih dalam mengenai alasan di balik dukungan proaktif NU dan sikap pasif Muhammadiyah, penelitian ini akan memberikan wawasan yang komprehensif tentang makna dan signifikansi Hari Santri Nasional dalam konteks sosial, budaya, dan keagamaan di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan Metode studi komparasi yang bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok, fenomena, atau konsep untuk memahami perbedaan, persamaan, dan hubungan di antara mereka. (Mahoney & Rueschemeyer, 2003) Dalam konteks penelitian mengenai respons terhadap penetapan Hari Santri Nasional, metode ini akan digunakan untuk meninjau dan menganalisis perbedaan pandangan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Penelitian akan melibatkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara, analisis dokumen, dan studi literatur terkait sikap kedua organisasi ini terhadap Hari Santri

Nasional. Dengan menggunakan studi komparasi, penelitian ini akan menyoroti bagaimana masing-masing organisasi merespons penetapan tersebut, alasan di balik respons mereka, serta implikasi sosial dan budaya yang ditimbulkan.

Sehingga penelitian ini termasuk dalam *Library Research* (penelitian pustaka) yang didukung oleh pendekatan sosial-politik. Pengumpulan data ini secara umum terdiri dari dua jenis, yaitu : a. Jenis Primer : sumber data primer yang dipakai adalah Keppres No.22 Tahun 2015. b. Jenis Sekunder : selain sumber data primer tersebut, penulis juga memanfaatkan buku, koran, website, artikel dan sebagainya sebagai bahan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **a. Santri**

Santri adalah pelajar yang berdomisili di pesantren untuk tunduk diri. Ini adalah kondisi mutlak agar ia dapat menjadi murid kiai secara menyeluruh. Artinya, santri harus mendapat persetujuan dari kiai, dengan patuh pada seluruh kemauannya dan mengabdikan pada seluruh kebutuhannya. (Wahid, 1978) Makna ini mengacu pada santri salaf yang belajar ilmu di pesantren tradisonal. Seorang santri tidak hanya memperoleh ilmu dari kiai tetapi juga mengabdikan diri sepenuhnya kepada kiai. Sistem ini adalah sistem pesantren tradisonal. (Zuhriy, 2011)

Santri secara umum terbagi menjadi dua kategori. Pertama, ada santri mukim, yakni para pelajar yang berasal dari tempat yang jauh dan tinggal di

lingkungan pesantren. Mereka yang tinggal lama di pesantren ini membentuk sebuah kelompok tersendiri yang bertanggung jawab atas urusan harian pesantren, termasuk pengajaran materi dasar dan menengah kepada santri baru. Pesantren yang besar sering memiliki anak-anak kiai dari pesantren lain yang belajar di sana, dan mereka biasanya mendapat perhatian khusus dari kiai. Peran anak-anak kiai ini sangat krusial dalam mempertahankan kepemimpinan pesantren. Kedua, terdapat santri kalong, yaitu siswa yang berasal dari desa sekitar pesantren namun tidak tinggal di pesantren. Mereka bolak-balik dari rumah ke pesantren untuk mengikuti pelajaran. Perbedaan antara pesantren besar dan kecil sering dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah santri mukim dan santri kalong. Pesantren yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak santri mukim, sedangkan pesantren yang lebih kecil memiliki lebih banyak santri kalong. (Dhofier, 1982)

Santri dapat dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan alasan masuk dan keluar dari pesantren. Pertama, ia ingin memperdalam pengetahuan tentang Islam dengan mempelajari kitab-kitab lain di bawah bimbingan kiai yang menjadi pemimpin pesantren tersebut. Kedua, ia ingin mendapatkan pengalaman kehidupan pesantren, baik dalam aspek-aspek pengajaran, keorganisasian maupun relasi dengan pesantren-pesantren yang populer. Ketiga, ia ingin fokus pada studinya di pesantren tanpa terganggu oleh kewajiban sehari-hari di rumah keluarganya. Selain itu, dengan menetap

di pesantren yang lokasinya sangat jauh dari rumahnya sendiri ia tidak sering pulang-pergi meskipun terkadang merindukannya.

Santri, sebagai kelompok sosial dengan tingkat pendidikan agama Islam yang komprehensif, umumnya telah mengikuti pembelajaran di pesantren. Kelompok ini menjadi inisiator dalam gerakan sosial dengan fondasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam.(Geertz, 2013)(Geertz, 2013)

Santri merupakan kelompok yang memelihara ketulusan praktik ibadah dalam Islam sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadits. Khususnya, santri yang berorientasi modernis cenderung tertarik pada wacana apologetik, dengan tujuan menjaga Islam sebagai etika yang relevan bagi masyarakat modern, sebagai doktrin sosial yang dapat diimplementasikan dalam masyarakat kontemporer, dan sebagai sumber nilai yang memberi kontribusi pada budaya modern.(Geertz, 2013)

Menurut penafsiran Clifford Geertz, konsep santri yang disampaikan menggambarkan pandangan santri yang berada dalam lingkup modernisasi, khususnya yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah di Indonesia. Santri dari Muhammadiyah diakui sebagai pelopor gerakan santri yang menghargai Al-Quran dan Hadits sebagai landasan fundamental agama Islam.

Kehadiran santri dengan orientasi modernis, seperti Muhammadiyah, (Sulistiyani, 2022) menciptakan sinergi dalam kelompok santri itu sendiri. Santri yang berorientasi tradisional, seperti

NU, cenderung berada di wilayah pedesaan, sementara santri modernis dari Muhammadiyah aktif di lingkungan perkotaan.(Bashori, 2017)

Secara umum, santri adalah individu yang memperdalam pengetahuan mengenai ajaran Islam, di mana proses pembelajarannya dilakukan melalui bimbingan seorang kiai kepada para siswanya. Pertemuan antara santri dan kiai umumnya terjadi di pondok pesantren. Saat ini, sistem pendidikan di pondok pesantren tidak jauh berbeda dengan sistem pendidikan konvensional yang mengkategorikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan akademik yang dimiliki oleh santri.

#### b. Hari santri nasional

Hari Santri Nasional ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Ir. Joko Widodo, pada tanggal 22 Oktober. Tujuan utama Hari Santri Nasional adalah memberikan apresiasi dan penghormatan terhadap kontribusi yang diberikan oleh para ulama dan santri terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Peringatan Hari Santri Nasional adalah sebuah bentuk penghargaan atas dedikasi yang telah diberikan oleh ulama dan santri. Pada peringatan Hari Santri Nasional tanggal 2 Oktober 2016, ulama dan santri melakukan kirab secara estafet dari Banyuwangi hingga Monas, Jakarta. Di Yogyakarta, festival berlangsung selama 5 hari untuk memperingati Hari Santri Nasional, yang bertujuan untuk menyatukan umat Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami esensi dari Hari Santri Nasional itu sendiri.

Selain dari aspek "Santri" dalam Hari Santri Nasional, kata-kata "Hari"

dan "Nasional" mengandung arti sebagai sebuah hari spesial yang dirayakan secara bersamaan di suatu negara. Istilah "Hari" dan "Nasional" sering kali merujuk pada tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghormati peristiwa sejarah, kelompok tertentu, atau kegiatan penting dalam kehidupan negara, seperti Hari Buruh Nasional, Hari Pahlawan Nasional, atau Hari Kesaktian Pancasila.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Hari Santri Nasional merupakan suatu penanda kalender yang secara resmi ditetapkan oleh pemerintah untuk menghargai kontribusi ulama dan santri terhadap pembangunan bangsa dan negara Indonesia. (ASH, 2017)

#### c. Proses penetapan hari santri

Proses Penetapan Hari Santri Nasional merupakan pencatatan sejarah yang menekankan peran vital santri dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Banyak tokoh santri, seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Abdul Wahid, Jenderal Sudirman, dan lainnya, yang menjadi pejuang kemerdekaan dan diakui sebagai pahlawan nasional, berperan dalam pembangunan Indonesia pasca-kemerdekaan. Bahkan, Abdurrahman Wahid, santri sejati, menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, menegaskan kontribusi santri tidak hanya dalam hal keagamaan tetapi juga dalam pembangunan negara.

Keberadaan santri membutuhkan penghargaan dan apresiasi agar nilai-nilai positifnya tidak terkikis oleh zaman modern. Pada tahun 2010, sejumlah kiai di Jawa Timur sepakat untuk mengirimkan surat rekomendasi kepada

pemerintah, mengusulkan Hari Santri Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan santri. Meskipun ada respons yang kurang positif dari pemerintah terkait rekomendasi ini, upaya tersebut terus dilanjutkan.

Pada tahun 2014 dalam pertemuan dengan ulama dan santri di pesantren Babussalam Malang, Presiden Joko Widodo saat itu masih sebagai kandidat calon presiden periode 2014-2019 berjanji akan menetapkan Hari Santri Nasional jika ia terpilih. Awal rencana penetapan itu diambil pada tanggal 1 Muharram dengan dibuktikan tanda tangan Presiden Joko Widodo di dalam pernyataan suratnya yang berisi kesiapan Jokowi jika terpilih pada pemilihan presiden tertanggal 9 juli 2014 untuk memperjuangkan dan menetapkan hari santri masuk pada bagian kalender nasional, hal ini ia sampaikan dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan dari siapa pun, malang 27 juni 2014. (Purnomo, 2014)

Berbagai kalangan, termasuk tokoh-tokoh agama dan organisasi masyarakat, berharap penetapan Hari Santri Nasional mencerminkan sejarah dan perjuangan santri. Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang terdiri dari beberapa organisasi Islam, menyarankan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, merujuk pada "Resolusi Jihad". (Mulyaningsih & Hamidah, 2018) yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari, yang menandai perjuangan santri melawan penjajah Belanda.

Setelah berbagai masukan dan rekomendasi, pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober.

Penetapan ini dimaksudkan untuk menghormati peran santri dalam perjuangan kemerdekaan, menunjukkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan semangat pengorbanan untuk Indonesia. Presiden Jokowi menekankan bahwa semangat santri adalah semangat persatuan dalam keberagaman, semangat untuk kesatuan Indonesia.(ASH, 2017)

#### d. Respons Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah

##### 1) Respons Nahdlatul Ulama

Organisasi Islam Nahdlatul Ulama, yang memiliki pandangan tradisional, dengan tegas mendukung Hari Santri Nasional. Meskipun tidak ada data yang eksplisit, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pesantren di Indonesia memiliki keterkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Ini menandakan bahwa mayoritas ulama dan santri di Indonesia berasal dari Nahdlatul Ulama. Hal ini menjadi dasar kuat bagi Nahdlatul Ulama untuk mendukung penetapan Hari Santri Nasional. Selain mendukung, Nahdlatul Ulama juga menjadi perintis Hari Santri Nasional. Rekomendasi resmi terkait penetapan Hari Santri Nasional pertama kali dikeluarkan oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj melalui surat rekomendasi bernomor 2548/A.II/03/10/2012 yang diharapkan ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 Muharram 1433 Hijriah atau 15 November 2012.(Purnomo, 2014) Meskipun pada waktu itu penetapan Hari Santri Nasional tidak terealisasikan Nahdlatul Ulama tetap berusaha mendorong pemerintah untuk menetapkan Hari Santri Nasional.

Pada tahun 2015, Nahdlatul Ulama mengajak organisasi masyarakat lainnya untuk memberikan rekomendasi terkait penetapan Hari Santri Nasional. Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI), yang terdiri dari 13 ormas, akhirnya mengirimkan rekomendasi dan menyampaikan surat dukungan mengenai penetapan hari santri kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara.(Khafifah, 2015)

Seorang perwakilan dari komunitas santri yang tergabung dalam kumpulan pesantren di seluruh Indonesia, yakni Said Agil Siradj, yang menjabat sebagai ketua umum PBNU, mengajukan saran kepada Presiden Joko Widodo bahwa penetapan hari santri akan lebih tepat jika jatuh pada tanggal 22 Oktober.(Pinardi, 2015)

Said Aqil Siraj, yang menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, mengemukakan pentingnya perkuatan dan peringatan Hari Santri karena minimal dua alasan. Pertama, sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan. Pengakuan semacam ini memiliki relevansi penting bagi generasi saat ini untuk mempertahankan ikatan dengan sejarah asal-usul mereka. Kedua, sebagai pemicu semangat patriotisme. Hal ini bermakna signifikan karena beberapa gagasan terkini di Indonesia tidak menunjukkan komitmen yang kuat terhadap semangat kebangsaan.(ASH, 2017)

Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional juga terhubung erat dengan Nahdlatul Ulama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pada tanggal tersebut, komunitas santri dan Nahdlatul Ulama secara signifikan

berkontribusi pada kemerdekaan Indonesia. Keputusan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asy' ari pada 22 Oktober menjadi faktor penting dalam keberhasilan perang pada 10 November.

KH. Hasyim Asy' ari, merupakan tokoh figur yang penting dalam Nahdlatul Ulama, hal menjelaskan mengapa organisasi tersebut sangat keras dalam memperjuangkan penetapan Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober. Namun, hal ini memunculkan persepsi bahwa Hari Santri Nasional terkesan eksklusif bagi Nahdlatul Ulama.

Fakta tentang pengaruh besar dari Resolusi Jihad terhadap kemerdekaan Indonesia tidak dapat disangkal. Peran langsung KH. Hasyim Asy' ari, seorang ulama berpengaruh di wilayah Jawa-Madura, menjadi contoh utama bagi ulama lainnya dan para santrinya. Seruan langsung untuk berjihad dalam membela tanah air memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi mayoritas masyarakat di wilayah Jawa-Madura dalam perang kemerdekaan. Peran K.H Hasyim Asy' ari dalam transformasi sosial masyarakat Indonesia tercatat dalam sejarah dengan sangat kuat.

Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa sejarah perjuangan kaum santri sering kali terlupakan. Pemerintah seringkali hanya memberikan perhatian pada kelompok nasionalis, padahal kaum santri memiliki peran yang signifikan dalam sosial. Hal ini mendorong Nahdlatul Ulama untuk gigih dalam menuntut penetapan Hari Santri Nasional. (Ida, 2004)

Nahdlatul Ulama juga percaya bahwa keberadaan Hari Santri akan meningkatkan kapabilitas para santri, yang juga dapat memberikan dampak positif pada kelompok non-santri. Secara politik, santri memiliki potensi yang baik dalam dinamika politik Indonesia. Apabila santri dapat berperan secara langsung dalam struktur politik tertinggi, hal ini dapat memberikan keuntungan bagi seluruh masyarakat Muslim, mengingat Islam masih menjadi mayoritas agama di Indonesia.

Kesimpulan dari fakta tersebut, bisa dirumuskan bahwa Nahdlatul Ulama mendukung adanya Hari Santri Nasional dengan berbagai alasan, seperti:

- a) Adanya Hari Santri Nasional membuktikan kepedulian pemerintah kepada para pelajar Islami yang mengenyam pendidikan di pesantren, dan memberikan penghargaan kepada para santri itu sendiri atas apa yang sudah mereka lakukan.
- b) Terdapat perayaan-perayaan penting dalam Islam yang telah diakui secara resmi dalam kalender nasional, seperti Idul Fitri, Idul Adha, 1 Muharram, Maulid Nabi, dan Isra' Mikraj. Namun, tidak terdapat perayaan khusus dalam Islam yang menjadi identitas atau ciri khas bagi bangsa Indonesia dalam kalender nasionalnya.
- c) Hari Santri Nasional, yang jatuh pada tanggal 22 Oktober, merupakan momen yang mengingatkan akan kejadian bersejarah terkait Resolusi Jihad yang dideklarasikan oleh K.H. Hasyim Asyari. Peristiwa ini



menjadi titik penting yang memobilisasi santri, pemuda, dan masyarakat dalam aksi bersama untuk melawan pasukan penjajah, mencapai puncaknya pada tanggal 10 November 1945.

- d) Kaum santri telah terbukti secara konsisten menjaga kestabilan serta perdamaian. Sejarah mencatat dengan jelas perjuangan para kiai, terutama sejak tercapainya kesepakatan terkait darul Islam (wilayah yang dianggap sebagai wilayah Islam) dalam pertemuan kiai di Banjarmasin pada tahun 1936. Bahkan, pada periode sepuluh tahun sejak pendirian NU dan sembilan tahun sebelum kemerdekaan, para kiai dan santri telah menyadari pentingnya konsep negara yang memberikan ruang bagi beragam kelompok untuk dapat hidup bersama secara harmonis. Konsep ini memperlihatkan sebuah gagasan yang sangat luar biasa.
- e) Tanggal 22 Oktober 1945 adalah waktu dimana sang pendiri Nahdlatul Ulama' Hadratussyeikh KH Hasyim Asy' ari mengeluarkan fatwa tentang Resolusi Jihad yang mewajibkan kepada kaum laki-laki muslim yang mampu untuk mengangkat senjata agar turut serta berjuang menghalau kedatangan kembali pasukan penjajah di kota Surabaya. Adanya Resolusi Jihad itulah yang kemudian memicu semangat nasionalisme para santri untuk turut serta dalam peperangan 10 November 1945. Sehingga sangat wajar jika Nahdlatul Ulama' menjadi pendukung paling depan

dalam penetapan Hari Santri Nasional. Nahdlatul ulama berpendapat bahwa Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy' ari merupakan titik balik perlawanan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah paska-proklamasi, dikarenakan dari Resolusi Jihad tersebutlah masyarakat Jawa Timur khususnya para santri berkumpul menjadi satu dalam peperangan 10 November 1945 untuk melawan bangsa asing yang sedang berusaha memasuki Indonesia lagi. (ASH, 2017)

## 2) Respons Muhammadiyah

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan penolakan terhadap Hari Santri Nasional. Muhammadiyah menganut semangat ukhuwah yang lebih inklusif dalam tubuh umat Islam, bertujuan menjaga kesatuan umat tanpa dibatasi oleh kategorisasi santri dan non-santri. Haedar berpandangan bahwa penetapan Hari Santri Nasional berpotensi memunculkan pemisahan dalam komunitas umat Islam di Indonesia, mengingat tidak semua umat Islam di negara ini mengidentifikasi diri sebagai santri. Santri dianggap sebagai satu variabel sosial dalam komunitas umat Islam, sementara masih ada variabel lain seperti umat Islam awam yang dikenal sebagai kaum abangan. Menetapkan sebuah hari yang spesifik untuk santri akan menciptakan suatu kategori yang memberikan nilai istimewa pada kelompok santri daripada kelompok abangan. Harus dicatat bahwa fatwa Resolusi Jihad, yang kemudian menjadi

tanggal penetapan Hari Santri Nasional, menggambarkan kewajiban perang membela tanah air bagi seluruh umat Muslim, bukan hanya khusus kalangan santri.(ASH, 2017)

Din Syamsuddin seorang tokoh Muhammadiyah dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, menyampaikan keberatan sejenis terkait dengan umat Islam yang terjebak dalam ritual mistik sosial semacam peringatan hari besar yang lebih menonjolkan kegiatan dan upacara massal semata. Dia mengungkapkan bahwa sebagian umat Islam merupakan yang masih tertinggal dalam banyak aspek kehidupan terutama dalam hal ekonomi, cenderung menggunakan banyak waktu, uang, dan energi pada kegiatan-kegiatan masal, upacara, serta prosesi kirab dan semacamnya. Walaupun memang kegiatan-kegiatan semacam itu memiliki nilai, namun cenderung bersifat konsumtif sehingga kurang produktif. Hal ini menyebabkan umat Islam kehilangan berbagai kesempatan untuk melakukan amal yang produktif guna meningkatkan kemajuan serta mengatasi ketertinggalan yang dialami.(Admin, 2015)

Penetapan Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober dinilai eksklusif karena merujuk pada peristiwa yang menghormati satu golongan khusus. Tanggal tersebut terhubung dengan dikeluarkannya "fatwa Resolusi Jihad" yang digagas oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan PBNU pada tahun 1945. Meski demikian, resolusi jihad hanya merupakan sebagian dari perlawanan rakyat Surabaya di bawah komando Soetomo alias Bung Tomo pada

puncaknya, yaitu 10 November 1945 yang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Benedict Anderson dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Bung Tomo adalah motor utama di balik perlawanan rakyat Surabaya, bersama Soemarsono dan kelompok pemuda lainnya dalam gerakan Republik Indonesia. Resolusi jihad memang penting dalam peristiwa 10 November 1945, namun bukan elemen utama dalam kesuksesan perang tersebut.(Admin, 2015)

Muhammadiyah mengakui kontribusi pesantren dalam perjuangan kemerdekaan, sejalan dengan peran umat Islam di seluruh Indonesia dalam melawan penjajah. Umat Islam di berbagai wilayah, termasuk Aceh, Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan daerah-daerah lain, secara bersama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dengan pengorbanan nyawa dan tenaga. Tiada satu pun yang lebih diutamakan daripada yang lain. Bahkan, umat Islam di Aceh bertempur melawan Belanda ketika banyak wilayah sudah lama menjadi jajahan.(Admin, 2015)

Muhammadiyah tidak menolak mengakui peran umat Islam lainnya, tetapi menekankan bahwa tidak bijaksana mereduksi perjuangan umat Islam secara keseluruhan hanya pada satu peristiwa dari satu kelompok Islam. Kualitas objektif dalam menilai perjuangan seluruh umat Islam tidak boleh diwakili semata-mata oleh satu peristiwa atau satu kelompok. (Admin, 2015b)

Dari berbagai fakta diatas, bisa disimpulkan respons penolakan dari Muhammadiyah beralasan 4 faktor

seperti yang tertulis dalam surat keberatan yang diajukan oleh Muhammadiyah kepada pemerintah, yaitu:

- a) Muhammadiyah menyoroti bahwa pengukuhan Hari Santri berpotensi menghasilkan pembatasan sosial yang dapat mengurangi integrasi nasional, serta memicu kembali sentimen keagamaan yang sebelumnya telah mereda.
- b) Umat Islam, termasuk Muhammadiyah, berupaya untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan batasan-batasan ini. Argumennya berfokus pada tidak produktifnya Hari Santri dan dianggap bertentangan dengan semangat persatuan bangsa.
- c) Penetapan Hari Santri pada tanggal 2 Oktober juga berpotensi menciptakan polemik, menghidupkan kembali sektarianisme, dan dari perspektif sejarah, dapat meremehkan sumbangan umat Islam dalam pembentukan serta pelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Menurut Muhammadiyah, Bung Karno dianggap secara pribadi sebagai seorang santri. Maka dari itu, penetapan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober bisa dianggap meremehkan peran dari kalangan santri dan umat Islam yang tidak terlibat dalam peristiwa pada tanggal tersebut. (Prabowo, 2015)

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks penelitian mengenai Hari Santri Nasional, terdapat poin-poin

penting yang muncul. Pertama, penetapan hari tersebut merupakan realisasi janji Presiden Jokowi dan respons terhadap rekomendasi PBNU. Penetapan pada tanggal 22 Oktober didasari pada fatwa resolusi jihad oleh KH. Hasyim Asy'ari. Kedua, respons terhadap penetapan Hari Santri Nasional beragam. NU sebagai penggagas utama mendukungnya sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa santri. Namun, Muhammadiyah menolak dengan alasan potensi konflik antara santri dan non-santri serta representasi satu golongan saja. Ketiga, perbedaan pandangan NU dan Muhammadiyah berakar dari landasan tradisional dan modernis masing-masing ormas. Meskipun berbeda, hal ini merupakan cerminan kebebasan berpendapat di Indonesia. Penanganan yang tepat adalah dengan menghormati pandangan berbeda tanpa menyalahkan, serta mengutamakan persatuan dalam NKRI. Mengakui peran ulama dan santri sebagai pilar utama kaum Muslim di Indonesia menjadi argumen penting mendukung penetapan Hari Santri Nasional. Pentingnya hari tersebut adalah untuk merenungkan perjuangan para ulama sebagai motivasi bagi peningkatan pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2015a). "Problem Hari Santri", Suara Muhammadiyah, edisi no 13 th ke-100,. *Suara Muhammadiyah*.
- Admin. (2015b). Seputar Hari Santri Edisi No 22 TH Ke-100. *Suara Muhammadiyah*.
- ASH, I. R. (2017). *Hari Santri Nasional (Studi Komparatif Respons Politik Ormas Nahdatul Ulama'dan Muhammadiyah)*. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bashori, B. (2017). Modernisasi lembaga pendidikan pesantren. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 6(1).
- BPK, J. (2015). *Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri*. Sekretariat BPK.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai*. Lp3es.
- Geertz, C. (2013). Agama Jawa: Abangan, santri, priyayi dalam kebudayaan Jawa. In *Komunitas Bambu*. Dharma Bakti.
- Ida, L. (2004). *NU muda: kaum progresif dan sekularisme baru*. Erlangga.
- Khafifah, N. (2015). NU dan 12 Ormas Islam Dorong Pemerintah Tetapkan 22 Oktober Jadi Hari Santri. *Detik News*.
- Mahoney, J., & Rueschemeyer, D. (2003). *Comparative historical analysis in the social sciences*. Cambridge University Press.
- Meliala, A. C. (2015). *Ini alasan 22 Oktober dijadikan Hari Santri Nasional*. Pikiran Rakyat.
- Mulyaningsih, J., & Hamidah, D. N. (2018). *Laskar Santri Pejuang Negeri: Rekam Jejak Laskar Hizbullah dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya*. *Jurnal Tamaddun*, 6(2).
- Pinardi, S. (2015). PBNU: Presiden Jokowi setuju Hari Santri 22 Oktober. *Antara News*.
- Prabowo, D. (2015). *Ini Isi Surat Keberatan Muhammadiyah ke Presiden Terkait Hari Santri*. Kompas.Com.
- Purnomo, A. (2014). Begini Sejarah Ide Hari Santri Nasional. *Pemilu, Tempo.Co*.
- Sitompul, E. M., & Th, M. (2011). *Nu & Pancasila*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Sulistiyani, F. E. D. (2022). Eksistensi Pemuda Muhammadiyah Dalam Meningkatkan Aqidah Masyarakat Di Jogokariyan Pada Tahun 1965-1999. *KARMAWIBANGGA: Historical Studies Journal*, 4(2), 79–86.
- Wahid, A. (1978). Bunga rampai pesantren. In *Dharma Bakti*.
- Zuhriy, M. S. (2011). Budaya pesantren dan pendidikan karakter pada pondok pesantren salaf. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(2), 287–310.